

## ABSTRAK

**Ria Fuji Fauziah** : *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Melakukan Pemasangan Kawat Gigi Oleh Dokter Gigi Umum Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kota Bandung)*

Pemasangan kawat gigi atau *dental braces* dewasa ini bukan hanya sebagai upaya kesehatan untuk permasalahan gigi yang berjejal akan tetapi kawat gigi dijadikan gaya hidup bagi masyarakat pada saat ini. Dokter gigi yang memiliki kewenangan menangani kasus pemasangan kawat gigi ialah dokter gigi spesialis ortodonti. Namun, pada kenyataannya pada saat ini banyak dokter gigi umum yang mengambil kesempatan ini untuk membuka praktek pemasangan kawat gigi dengan biaya yang lebih murah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh seseorang yang bukan spesialisnya, menjadikan adanya kerugian yang dialami pasien yang melakukannya.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum, untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum, metode pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dikaitkan dengan penyelesaian dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien serta terori penegakan hukum dihubungkan dengan penegakan hukum di masyarakat terhadap praktik dokter gigi umum yang melakukan pemasangan kawat gigi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum pasien dapat melaporkan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi pada saat ini pasien belum pernah ada yang melapor dikarenakan mereka menganggap masalah ini masalah sepele dan kurangnya sosialisasi oleh pihak PDGI maupun organisasi ikatan ortodonti mengenai pelayanan kesehatan pemasangan kawat gigi tersebut.